



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Jimerto No. 25 - 27 Lantai V Surabaya 60272
Telepon (031) 5312144 Pesawat 384, 527, 164, 275 Faximile (031) 5450154
Laman Surabaya.go.id, Pos-el : dinkominfo@surabaya.go.id

KEPUTUSAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
NOMOR : 500.12.18.1 / 1693 / 436.7.13 / 2025
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH KOTA SURABAYA
TAHUN 2025

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik perlu menetapkan Pengklasifikasian Informasi Publik dalam bentuk Daftar Informasi Publik;
- b. bahwa penetapan Daftar Informasi Publik pada Badan Publik perlu ditetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Surabaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Surabaya untuk menetapkan Daftar Informasi Publik Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2025.
- MENINGGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 127);

6. Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 100.3.3.3/40/436.1.2/2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KOTA SURABAYA TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH KOTA SURABAYA TAHUN 2025
- PERTAMA : Menetapkan Daftar Informasi Publik Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2025
- KEDUA : Daftar Informasi Publik (DIP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama terdiri atas :
1. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya,
pada tanggal 17 Februari 2025
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



Muhammad Fikser, AP, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197405091994121001



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Taman Surya No. 1 Surabaya 60272
Telepon (031) 5345689, 5312144 Faximile (031) 5345689
Laman surabaya.go.id, Pos-el : umum@surabaya.go.id

Surabaya, 13 FEB 2025

Nomor : 500.12.18.1/131 /436.7.13/2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Persetujuan Penetapan Daftar
Informasi Publik Pemerintah Kota
Surabaya Tahun 2025

Yth. Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika selaku PPID Kota Surabaya
di –
Surabaya

Menindaklanjuti surat Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku PPID Kota Surabaya, Nomor : 500.12.18.1/1236/436.7.13/2024 tanggal 04 Februari 2025 hal Usulan Penetapan Daftar Informasi Publik Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2025, dan Ketentuan Pasal 45 ayat (6) Peraturan Komisi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, bahwa Atasan PPID Kota Surabaya memberikan persetujuan atas usulan yang Saudara ajukan sebagaimana Daftar Informasi Publik PPID Kota Surabaya Tahun 2025 terlampir, untuk dapat diproses dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan Saudara dalam bentuk Keputusan.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

Sekretaris Daerah Kota Surabaya
Selaku Atasan PPID Kota Surabaya,



Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 196908091995011002

Lampiran Persetujuan Penetapan
 Daftar Informasi Publik Pemerintah Kota
 Surabaya Tahun 2025
 Nomor : 500.12.18.1/3131/436.7.13/2025
 Tanggal : 13 Februari 2025

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK PPID KOTA SURABAYA
 TAHUN 2025**

No	Ringkasan Isi Informasi	Penanggungjawab	Waktu
1	Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD	Dinas Pendidikan	2025
2	Angka anak tidak sekolah jenjang SD/ sederajat	Dinas Pendidikan	2025
3	Angka anak tidak sekolah jenjang SMP/ sederajat	Dinas Pendidikan	2025
4	Indeks Pendidikan	Dinas Pendidikan	2025
5	Jumlah Lembaga Penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan	2025
6	Jumlah satuan pendidikan yang diakreditasi sesuai Standar Nasional Pendidikan	Dinas Pendidikan	2025
7	Jumlah Sekolah dan Siswa Inklusi per Kecamatan	Dinas Pendidikan	2025
8	Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta Menurut Jenjang Pendidikan per Kecamatan	Dinas Pendidikan	2025
9	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Harus Dilayani Pendidikan PAUD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2025
10	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Harus Dilayani Pendidikan PAUD	Dinas Pendidikan	2025
11	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun Yang Harus Dilayani Pendidikan Dasar (SD/MI,SMP/MTs)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2025
12	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun Yang Harus Dilayani Pendidikan Dasar (SD/MI,SMP/MTs)	Dinas Pendidikan	2025
13	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK pelayanan HIV yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
14	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK pelayanan HIV yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
15	Alat Ukur Berat Badan untuk usia produktif yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
16	Alat Ukur Berat Badan untuk usia produktif yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
17	Alat Ukur Lingkar Perut untuk usia produktif yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
18	Alat Ukur Lingkar Perut untuk usia produktif yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
19	Alat Ukur Tinggi Badan untuk usia produktif yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
20	Alat Ukur Tinggi Badan untuk usia produktif yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
21	Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM) yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
22	Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM) yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025

23	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan	2025
24	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	2025
25	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai Standar untuk pelayanan HIV yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
26	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai Standar untuk pelayanan HIV yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
27	Banyaknya Dokter Umum, Gigi, Spesialis di Kota Surabaya	Dinas Kesehatan	2025
28	Banyaknya Fasilitas Kesehatan Menurut Jenis, Status dan Kapasitas Tempat Tidur	Dinas Kesehatan	2025
29	Banyaknya Fasilitas Kesehatan menurut Jenisnya per Kecamatan	Dinas Kesehatan	2025
30	Banyaknya Kapasitas Tempat Tidur di Rumah Sakit menurut kelas perawatan	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	2025
31	Banyaknya Kunjungan Baru dan Lama di Puskesmas menurut Poli per Kecamatan	Dinas Kesehatan	2025
32	Banyaknya kunjungan pasien menurut cara bayar di rumah sakit	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	2025
33	Banyaknya Kunjungan Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	2025
34	Banyaknya Kunjungan Pasien Rawat Jalan menurut poliklinik di Rumah Sakit	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	2025
35	Banyaknya Kunjungan, Kunjungan Baru, dan Lama di Puskesmas per Kecamatan	Dinas Kesehatan	2025
36	Banyaknya Penyakit Utama yang Ditemukan di Puskesmas Menurut Jenis Penyakit	Dinas Kesehatan	2025
37	Banyaknya Penyakit Utama yang Ditemukan Rumah Sakit menurut Jenis Penyakit	Dinas Kesehatan	2025
38	Banyaknya Puskesmas dan Puskesmas Pembantu per Kecamatan	Dinas Kesehatan	2025
39	Banyaknya Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Rumah Sakit Bersalin, Klinik/Balai Kesehatan, Posyandu dan Poskeskel per Kecamatan	Dinas Kesehatan	2025
40	Banyaknya Tenaga Kesehatan di Kota Surabaya per jenis tenaga kesehatan	Dinas Kesehatan	2025
41	Banyaknya Tenaga Kesehatan menurut Fasilitas Kesehatan per Kecamatan	Dinas Kesehatan	2025
42	Banyaknya Tenaga menurut Jenis Ketenagaan di Rumah Sakit	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	2025
43	Buku Kesehatan Lansia yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
44	Buku Kesehatan Lansia yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
45	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
46	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
47	Buku Pemantauan Kesehatan yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
48	Buku Pemantauan Kesehatan yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
49	Buku Raport Kesehatanku yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025

50	Buku Raport Kesehatanku yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
51	Cakupan pelayanan kesehatan esensial.	Dinas Kesehatan	2025
52	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	Dinas Kesehatan	2025
53	Catridge Tes Cepat Molekuler Reagen Zn TB yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
54	Catridge Tes Cepat Molekuler Reagen Zn TB yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
55	Dokter dan/atau perawat terlatih jiwa yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
56	Dokter dan/atau perawat terlatih jiwa yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
57	Formulir Partograf yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
58	Formulir Partograf yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
59	Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) untuk usia produktif yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
60	Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) untuk usia produktif yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
61	Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM untuk penderita hipertensi yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
62	Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM untuk penderita hipertensi yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
63	Formulir Pencatatan dan Pelaporan pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
64	Formulir Pencatatan dan Pelaporan pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
65	Formulir Pencatatan dan Pelaporan pelayanan TB yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
66	Formulir Pencatatan dan Pelaporan pelayanan TB yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
67	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
68	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
69	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
70	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
71	Glukometer untuk penderita Diabetes melitus yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
72	Glukometer untuk penderita Diabetes melitus yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
73	Glukometer untuk usia produktif yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
74	Glukometer untuk usia produktif yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
75	Hasil Penilaian Akreditasi RSUD Bhakti Dharma Husada	RSUD Bhakti Dharma Husada	2025

76	Hasil Penilaian Akreditasi RSUD dr. Mohamad Soewandhie	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	2025
77	Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G) untuk usia lanjut yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
78	Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G) untuk usia lanjut yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
79	Jarum Suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP) untuk balita usia 0-59 yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
80	Jarum Suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP) untuk balita usia 0-59 yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
81	Jumlah Ahli Gizi yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
82	Jumlah Ahli Gizi yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
83	Jumlah Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil (Pemeriksaan Glukoprotein Urin) yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
84	Jumlah Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil (Pemeriksaan Glukoprotein Urin) yang tersedia	Dinas Kesehatan	2025
85	Jumlah Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil (Pemeriksaan Golongan Darah) yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
86	Jumlah Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil (Pemeriksaan Golongan Darah) yang tersedia	Dinas Kesehatan	2025
87	Jumlah Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil (Pemeriksaan HB) yang dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
88	Jumlah Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil (Pemeriksaan HB) yang tersedia	Dinas Kesehatan	2025
89	Jumlah Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil (Test Kehamilan) yang dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
90	Jumlah Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil (Test Kehamilan) yang tersedia	Dinas Kesehatan	2025
91	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	RSUD Bhakti Dharma Husada	2025
92	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	2025
93	Jumlah balita harus dilayani Pelayanan Kesehatan Balita	Dinas Kesehatan	2025
94	Jumlah balita harus dilayani Vaksin Imunisasi Dasar Polio	Dinas Kesehatan	2025
95	Jumlah balita terlayani Pelayanan Kesehatan Balita	Dinas Kesehatan	2025
96	Jumlah balita terlayani Vaksin Imunisasi Dasar Polio	Dinas Kesehatan	2025
97	Jumlah bayi baru lahir yang harus dilayani Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	Dinas Kesehatan	2025
98	jumlah bayi baru lahir yang harus dilayani Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinas Kesehatan	2025
99	Jumlah bayi baru lahir yang harus dilayani Salep/tetes mata antibiotik untuk bayi baru lahir	Dinas Kesehatan	2025

100	Jumlah bayi baru lahir yang terlayani Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	Dinas Kesehatan	2025
101	jumlah bayi baru lahir yang terlayani Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinas Kesehatan	2025
102	Jumlah bayi baru lahir yang terlayani Salep/tetes mata antibiotik untuk bayi baru lahir	Dinas Kesehatan	2025
103	Jumlah Bidan yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
104	Jumlah Bidan yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
105	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	RSUD Bhakti Dharma Husada	2025
106	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	2025
107	Jumlah Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) untuk balita usia 0-59 yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
108	Jumlah Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) untuk balita usia 0-59 yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
109	Jumlah Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) untuk bayi baru lahir yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
110	Jumlah Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) untuk bayi baru lahir yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
111	Jumlah Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) untuk ibu bersalin yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
112	Jumlah Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) untuk ibu bersalin yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
113	Jumlah Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) untuk ibu hamil yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
114	Jumlah Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) untuk ibu hamil yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
115	Jumlah dokter yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
116	Jumlah dokter yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
117	Jumlah Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
118	Jumlah Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
119	Jumlah Dokter/Dokter gigi yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
120	Jumlah Dokter/Dokter gigi yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
121	Jumlah Dokter/dokter spesialis Anak yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
122	Jumlah Dokter/dokter spesialis Anak yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
123	Jumlah Dokter/dokter spesialis kebidanan dan kandungan yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
124	Jumlah Dokter/dokter spesialis kebidanan dan kandungan yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
125	Jumlah Dokter/dokter spesialis kebidanan yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
126	Jumlah Dokter/dokter spesialis kebidanan yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
127	Jumlah Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
128	Jumlah Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
129	Jumlah Formulir bayi baru lahir yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025

130	Jumlah Formulir bayi baru lahir yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
131	Jumlah Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK) yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
132	Jumlah Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK) yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
133	Jumlah ibu bersalin yang harus dilayani Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinas Kesehatan	2025
134	Jumlah ibu bersalin yang terlayani Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinas Kesehatan	2025
135	Jumlah ibu hamil yang harus dilayani Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	2025
136	Jumlah ibu hamil yang terlayani Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	2025
137	Jumlah indikator SPM yang dicapai	RSUD Bhakti Dharma Husada	2025
138	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di RS yang direncanakan	RSUD Bhakti Dharma Husada	2025
139	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di RS yang terpenuhi	RSUD Bhakti Dharma Husada	2025
140	Jumlah kader kesehatan yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
141	Jumlah kader kesehatan yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
142	Jumlah Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu untuk ibu bersalin yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
143	Jumlah Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu untuk ibu bersalin yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
144	Jumlah Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu untuk ibu hamil yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
145	Jumlah Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu untuk ibu hamil yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
146	Jumlah kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas yang harus mendapat respon cepat (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	Dinas Kesehatan	2025
147	Jumlah kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas yang mendapat respon cepat (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	Dinas Kesehatan	2025
148	Jumlah kelompok alat kesehatan/alat penunjang medik yang diadakan	RSUD Bhakti Dharma Husada	2025
149	Jumlah kelompok alat kesehatan/alat penunjang medik yang diadakan dari DBHCHT	RSUD Bhakti Dharma Husada	2025
150	Jumlah kelompok alat kesehatan/alat penunjang medik yang direncanakan	RSUD Bhakti Dharma Husada	2025
151	Jumlah Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
152	Jumlah Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
153	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	RSUD Bhakti Dharma Husada	2025
154	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	2025
155	Jumlah Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner) pelayanan HIV yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025

156	Jumlah Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner) pelayanan HIV yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
157	Jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerjanya yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Dinas Kesehatan	2025
158	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	2025
159	Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis	Dinas Kesehatan	2025
160	Jumlah Peralatan Anafilaktik yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
161	Jumlah Peralatan Anafilaktik yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
162	Jumlah Perawat yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
163	Jumlah Perawat yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
164	Jumlah rumah sakit milik pemerintah kota surabaya	Dinas Kesehatan	2025
165	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	RSUD Bhakti Dharma Husada	2025
166	Jumlah sarana prasarana RSUD Bhakti Dharma Husada yang disediakan	RSUD Bhakti Dharma Husada	2025
167	Jumlah sarana prasarana sesuai standar	RSUD Bhakti Dharma Husada	2025
168	Jumlah sasaran ibu bersalin/nifas	Dinas Kesehatan	2025
169	Jumlah sasaran ibu hamil	Dinas Kesehatan	2025
170	Jumlah sasaran kelahiran hidup	Dinas Kesehatan	2025
171	Jumlah sasaran usila	Dinas Kesehatan	2025
172	Jumlah seluruh indikator SPM	RSUD Bhakti Dharma Husada	2025
173	Jumlah Sistem Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan	2025
174	Jumlah Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi	Dinas Kesehatan	2025
175	Jumlah Tablet Tambah Darah untuk ibu hamil yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
176	Jumlah Tablet Tambah Darah untuk ibu hamil yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
177	Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
178	Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
179	Jumlah tenaga kesehatan Pemerintah Kota Surabaya	Dinas Kesehatan	2025
180	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan	Dinas Kesehatan	2025
181	Jumlah Tenaga Non Kesehatan Terlatih atau mempunyai; kualifikasi tertentu yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
182	Jumlah Tenaga Non Kesehatan Terlatih atau mempunyai; kualifikasi tertentu yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
183	Jumlah Tes Cepat HIV (RDT) Pertama yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025

184	Jumlah Tes Cepat HIV (RDT) Pertama yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
185	Jumlah tunjangan ASN yang dibayarkan	Dinas Kesehatan	2025
186	Jumlah UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat)	Dinas Kesehatan	2025
187	Jumlah UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat) Aktif	Dinas Kesehatan	2025
188	Jumlah usila mendapat pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan	2025
189	Jumlah Vaksin Hepatitis B0 untuk bayi baru lahir yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
190	Jumlah Vaksin Hepatitis B0 untuk bayi baru lahir yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
191	Jumlah Vaksin Tetanus Difetri (Td) untuk ibu hamil yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
192	Jumlah Vaksin Tetanus Difetri (Td) untuk ibu hamil yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
193	Jumlah Vitamin K1 injeksi untuk bayi baru lahir yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
194	Jumlah Vitamin K1 injeksi untuk bayi baru lahir yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
195	Jumlah Warga Negara berusia 60 tahun keatas sasaran (wajib mendapatkan) layanan kesehatan	Dinas Kesehatan	2025
196	Jumlah Warga Negara berusia 60 tahun keatas yang mendapatkan layanan kesehatan	Dinas Kesehatan	2025
197	Jumlah Warga Negara Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) sasaran (wajib mendapat) layanan kesehatan	Dinas Kesehatan	2025
198	Jumlah Warga Negara Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) yang terlayani Kesehatan	Dinas Kesehatan	2025
199	Jumlah Warga Negara Dengan Risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (Human Immunodeficiency Virus) yang harus dilayani Layanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	2025
200	Jumlah Warga Negara Dengan Risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (Human Immunodeficiency Virus) yang terlayani Layanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	2025
201	Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Melitus sasaran (wajib mendapatkan) layanan kesehatan	Dinas Kesehatan	2025
202	Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	Dinas Kesehatan	2025
203	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi sasaran (wajib mendapatkan) layanan kesehatan	Dinas Kesehatan	2025
204	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	Dinas Kesehatan	2025
205	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis sasaran (wajib mendapatkan) layanan kesehatan	Dinas Kesehatan	2025
206	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	Dinas Kesehatan	2025
207	Jumlah Warga negara usia pendidikan dasar sasaran (wajib mendapat) layanan kesehatan	Dinas Kesehatan	2025
208	Jumlah Warga negara usia pendidikan dasar yang mendapat layanan kesehatan	Dinas Kesehatan	2025

209	Jumlah warga negara usia produktif yang harus dilayani Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	2025
210	Jumlah warga negara usia produktif yang terlayani Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	2025
211	Kapas Alkohol untuk penderita Diabetes melitus yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
212	Kapas Alkohol untuk penderita Diabetes melitus yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
213	Kapas Alkohol untuk usia produktif yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
214	Kapas Alkohol untuk usia produktif yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
215	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Dinas Kesehatan	2025
216	Kematian akibat penyakit jantung, kanker, diabetes, atau penyakit pernapasan kronis.	Dinas Kesehatan	2025
217	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan (Bidan)	Dinas Kesehatan	2025
218	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan (Dokter Gigi)	Dinas Kesehatan	2025
219	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan (Dokter Umum)	Dinas Kesehatan	2025
220	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan (Farmasi)	Dinas Kesehatan	2025
221	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan (Gizi)	Dinas Kesehatan	2025
222	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan (kesehatan Lingkungan)	Dinas Kesehatan	2025
223	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan (kesehatan Masyarakat)	Dinas Kesehatan	2025
224	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan (Perawat)	Dinas Kesehatan	2025
225	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Dinas Kesehatan	2025
226	Kit Berisi 2 Alat Fiksasi untuk ODGJ berat yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
227	Kit Berisi 2 Alat Fiksasi untuk ODGJ berat yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
228	KIT IVA Tes untuk usia produktif yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
229	KIT IVA Tes untuk usia produktif yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
230	Kuesioner Skrining Kesehatan untuk Warga negara usia pendidikan dasar yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
231	Kuesioner Skrining Kesehatan untuk Warga negara usia pendidikan dasar yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
232	Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama, Satu kali pada trimester kedua, Dua kali pada trimester ketiga)	Dinas Kesehatan	2025
233	Lancet untuk penderita Diabetes melitus yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
234	Lancet untuk penderita Diabetes melitus yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
235	Lancet untuk usia produktif yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
236	Lancet untuk usia produktif yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
237	Masker Jenis Rumah Tangga dan Masker N95 untuk pelayanan TB yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
238	Masker Jenis Rumah Tangga dan Masker N95 untuk pelayanan TB yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
239	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner) pelayanan TB yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025

240	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner) pelayanan TB yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
241	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
242	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
243	Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	2025
244	Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan	RSUD Bhakti Dharma Husada	2025
245	Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	2025
246	Obat diabetes melitus yang dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
247	Obat diabetes melitus yang tersedia	Dinas Kesehatan	2025
248	Obat hipertensi yang dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
249	Obat hipertensi yang tersedia	Dinas Kesehatan	2025
250	Pedoman dan Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) untuk usia produktif yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
251	Pedoman dan Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) untuk usia produktif yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
252	Pedoman dan Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
253	Pedoman dan Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
254	Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
255	Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
256	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan TB yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
257	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan TB yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
258	Penata Rontgen yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
259	Penata Rontgen yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
260	Penderita Diabetes Melitus yang harus dilayani Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SI PTM)	Dinas Kesehatan	2025
261	Penderita Diabetes Melitus yang Terlayani Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SI PTM)	Dinas Kesehatan	2025
262	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap (kelompok penduduk 40% terbawah)	Dinas Kesehatan	2025
263	Persentase Balita obesitas (BB/TB) kelompok umur 0-59 bulan	Dinas Kesehatan	2025
264	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Dinas Kesehatan	2025

265	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Bhakti Dharma Husada yang mencapai target	RSUD Bhakti Dharma Husada	2025
266	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD dr. Mohamad Soewandhie yang mencapai target	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	2025
267	Persentase Jenis Kebutuhan Operasional Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di RS yang terpenuhi	RSUD Bhakti Dharma Husada	2025
268	Persentase jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di rumah sakit yang terpenuhi	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	2025
269	Persentase jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	Dinas Kesehatan	2025
270	Persentase jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	Dinas Kesehatan	2025
271	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	2025
272	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai dengan kelas rumah sakit	RSUD Bhakti Dharma Husada	2025
273	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai dengan kelas rumah sakit	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	2025
274	Persentase makanan memenuhi syarat	Dinas Kesehatan	2025
275	Persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun.	Dinas Kesehatan	2025
276	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV yang datang ke fasyankes dan mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	Dinas Kesehatan	2025
277	Persentase Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana Prasarana Rumah Sakit	RSUD Bhakti Dharma Husada	2025
278	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	RSUD Bhakti Dharma Husada	2025
279	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	2025
280	Persentase Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan RSUD Mohamad Soewandhie	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	2025
281	Persentase pengunjung berusia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	Dinas Kesehatan	2025
282	Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	Dinas Kesehatan	2025
283	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. (kelompok penduduk 40% terbawah)	Dinas Kesehatan	2025

284	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. (kelompok penduduk 40% terbawah)	Dinas Kesehatan	2025
285	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.	Dinas Kesehatan	2025
286	Peta apotek	Dinas Kesehatan	2025
287	Peta klinik	Dinas Kesehatan	2025
288	Peta laboratorium	Dinas Kesehatan	2025
289	Peta puskesmas	Dinas Kesehatan	2025
290	Peta puskesmas pembantu	Dinas Kesehatan	2025
291	Peta rumah sakit	Dinas Kesehatan	2025
292	Peta Rumah Sehat	Dinas Kesehatan	2025
293	Peta sebaran posyandu dan poskeskel	Dinas Kesehatan	2025
294	Peta sebaran rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	Dinas Kesehatan	2025
295	Peta sebaran wilayah dengan balita stunting dan gizi buruk	Dinas Kesehatan	2025
296	Pot Dahak, Kaca Slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak Pengereng yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
297	Pot Dahak, Kaca Slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak Pengereng yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
298	Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun.	Dinas Kesehatan	2025
299	Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada anak balita. (24-59 bulan)	Dinas Kesehatan	2025
300	Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada anak balita.(0-23 bulan)	Dinas Kesehatan	2025
301	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun.	Dinas Kesehatan	2025
302	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Dinas Kesehatan	2025
303	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Dinas Kesehatan	2025
304	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat essensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan.	Dinas Kesehatan	2025
305	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Dinas Kesehatan	2025
306	Proporsi rumah tangga dengan akses pada layanan sanitasi dasar	Dinas Kesehatan	2025
307	Reagen Zn TB yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
308	Reagen Zn TB yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
309	Strip Tes Gula Darah untuk penderita Diabetes melitus yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
310	Strip Tes Gula Darah untuk penderita Diabetes melitus yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
311	Strip Uji Pemeriksaan * Gula Darah * Kolesterol untuk usia lanjut yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
312	Strip Uji Pemeriksaan * Gula Darah * Kolesterol untuk usia lanjut yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
313	Tenaga kesehatan lainnya yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025

314	Tenaga kesehatan lainnya yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
315	Tensimeter untuk usia produktif yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
316	Tensimeter untuk usia produktif yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
317	Tensimeter yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
318	Tensimeter yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
319	Tes Strip Gula Darah untuk usia produktif yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
320	Tes Strip Gula Darah untuk usia produktif yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
321	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	RSUD Bhakti Dharma Husada	2025
322	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	2025
323	Vaksin Imunisasi Dasar BCG yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
324	Vaksin Imunisasi Dasar BCG yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
325	Vaksin Imunisasi Dasar HBO yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
326	Vaksin Imunisasi Dasar HBO yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
327	Vaksin Imunisasi Dasar: Campak yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
328	Vaksin Imunisasi Dasar: Campak yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
329	Vaksin Imunisasi Dasar: DPT -HB -Hib yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
330	Vaksin Imunisasi Dasar: DPT -HB -Hib yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
331	Vaksin Imunisasi Dasar: IPV yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
332	Vaksin Imunisasi Dasar: IPV yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
333	Vaksin Imunisasi Dasar: Rubella yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
334	Vaksin Imunisasi Dasar: Rubella yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
335	Vaksin Imunisasi Lanjutan Campak yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
336	Vaksin Imunisasi Lanjutan Campak yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
337	Vaksin Imunisasi Lanjutan DPT -HB -Hib yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
338	Vaksin Imunisasi Lanjutan DPT -HB -Hib yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
339	Vaksin Imunisasi Lanjutan Rubella yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
340	Vaksin Imunisasi Lanjutan Rubella yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
341	Vitamin A Biru yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
342	Vitamin A Biru yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
343	Vitamin A Merah yang Dibutuhkan	Dinas Kesehatan	2025
344	Vitamin A Merah yang Tersedia	Dinas Kesehatan	2025
345	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki Jakstrada air minum	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2025
346	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki RISPAM	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2025

347	Nama Jalan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	2025
348	Persentase penanganan penyerahan PSU secara fisik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	2025
349	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	Dinas Kesehatan	2025
350	Peta Batas Administrasi Kota Surabaya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	2025
351	Peta RISPAM	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2025
352	Banyaknya Surat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG/IMB) per Bulan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2025
353	Banyaknya Surat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG/IMB) yang Dikeluarkan menurut Jenis Bangunan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2025
354	Daftar Surat - Surat Pelayanan Bidang Tata Kota Surabaya Tentang Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) berkas terbit	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2025
355	Indeks Keciptakarya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	2025
356	Jumlah kabupaten/kota yang menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	2025
357	Jumlah Pemerintah daerah yang telah memiliki peraturan tentang Bangunan Gedung Hijau/sejenis	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	2025
358	Jumlah penyerahan PSU secara fisik yang selesai ditangani	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	2025
359	Jumlah Petugas, Perpustakaan Umum dan Taman Baca per Kecamatan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2025
360	Jumlah yang harus dilayani Subsidi Uang Sewa	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	2025
361	Jumlah yang terlayani Subsidi Uang Sewa	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	2025
362	Peta Sebaran Lokasi Rusun	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	2025
363	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana yang dibutuhkan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
364	Banyaknya Kebakaran menurut Jenis Kebakaran, Sebab Kebakaran, Luas Terbakar, Korban Jiwa dan Kerugian per Bulan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2025
365	Banyaknya Kejadian Bencana Kota Surabaya berdasarkan Jenisnya	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
366	Banyaknya Kejadian Bencana Kota Surabaya berdasarkan Wilayah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025

367	Banyaknya Personil Pasukan Pencegah Kebakaran Menurut Lokasi Penempatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2025
368	Banyaknya Sumur Kebakaran Menurut Keadaannya (Keadaan Baik dan Keadaan Rusak)	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2025
369	Banyaknya Unit Mobil Pemadam Kebakaran Menurut Keadaannya per Bulan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2025
370	Indeks Kesiapsiagaan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
371	Indeks Ketahanan Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
372	Indeks Penanggulangan Bencana, Ketentraman dan Ketertiban Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
373	Indeks Penanggulangan Bencana, Ketentraman dan Ketertiban Kota	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2025
374	Indeks Penanggulangan Bencana, Ketentraman dan Ketertiban Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	2025
375	Indeks Risiko Bencana Indonesia	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
376	Jenis kejadian bencana yang ditangani dalam Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
377	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
378	Jumlah daerah pelaksana kegiatan mitigasi multiancamn bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
379	Jumlah dokumen kajian risiko dan tata ruang di kawasan rawan bencana dan pascabencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
380	Jumlah forum konsolidasi data, informasi, dan pengetahuan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
381	Jumlah kab/kota yang memiliki standar minimal peralatan dan logistik kebencanaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
382	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
383	Jumlah kebutuhan Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
384	Jumlah kebutuhan Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
385	Jumlah kebutuhan Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
386	Jumlah Kejadian Evakuasi Menurut Jenisnya per Bulan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2025
387	Jumlah kelompok masyarakat tangguh bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
388	Jumlah kelurahan tangguh bencana yang baru dibentuk dikawasan rawan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
389	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana per kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
390	Jumlah Kerugian nominal akibat bencana alam	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
391	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
392	Jumlah korban hilang akibat bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025

393	Jumlah korban mengungsi akibat bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
394	Jumlah korban mengungsi per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
395	Jumlah korban meninggal akibat bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
396	Jumlah korban meninggal dan hilang akibat bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
397	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana hidrometeorologi per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
398	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak langsung bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
399	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
400	Jumlah korban terluka akibat bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
401	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
402	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
403	Jumlah layanan data dan informasi bencana yang akurat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
404	Jumlah lembaga yang mendapat sosialisasi tentang mitigasi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
405	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
406	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
407	Jumlah pelaksanaan kegiatan dalam Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
408	Jumlah pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota yang menerapkan strategi bencana nasional	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
409	Jumlah Pengaduan Kedaruratan pada Command Center	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
410	Jumlah pengaduan kedaruratan yang direspon < 7 menit	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
411	Jumlah penyusunan kajian untuk kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
412	Jumlah penyusunan kajian untuk regulasi dan tata kelola bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
413	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
414	Jumlah personal/Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendapatkan Peningkatan kapasitas (aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
415	Jumlah personal/Sumber Daya Manusia (SDM) yang perlu mendapatkan Peningkatan kapasitas (aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
416	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	Kec. Bubutan	2025

417	Jumlah realisasi Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana yang dilayani	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
418	Jumlah realisasi Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
419	Jumlah realisasi Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
420	Jumlah realisasi Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
421	Jumlah realisasi Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
422	Jumlah rencana Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana yang harus dilayani	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
423	Jumlah rencana Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
424	Jumlah satgas tangguh bencana mandiri yang terbentuk	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
425	Jumlah sistem kebencanaan yang dikembangkan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
426	Jumlah sistem komando penanganan darurat bencana (koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
427	Jumlah sistem komando penanganan darurat bencana yang aktif (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
428	Jumlah Sistem Mitigasi Multiancamam Bencana (MHEWS) terpadu	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
429	Jumlah sosialisasi pengurangan risiko bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
430	Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan	Kec. Bubutan	2025
431	Jumlah temuan pelanggaran Perda di wilayah kecamatan yang ditangani	Kec. Bubutan	2025
432	Jumlah warga negara di daerah rawan bencana terlayani Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
433	Jumlah warga negara di Kawasan rawan bencana yang dilakukan Identifikasi dan pemetaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
434	Jumlah warga negara di Kawasan rawan bencana yang dilakukan Identifikasi dan pemetaan Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
435	Jumlah warga negara di Kawasan rawan bencana yang harus dilakukan Identifikasi dan pemetaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
436	Jumlah warga negara korban bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
437	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025

438	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
439	Jumlah warga negara yang harus memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
440	Jumlah warga negara yang harus memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
441	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
442	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
443	Jumlah warga yang terkena/menjadi korban bencana yang harus dilayani Pendataan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
444	Jumlah warga yang terkena/menjadi korban bencana yang terlayani Pendataan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
445	Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
446	Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	Satuan Polisi Pamong Praja	2025
447	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen kajian risiko bencana yang disusun (dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
448	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen kajian risiko bencana yang harus disusun (dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
449	Penanganan Bencana yang Terintegrasi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
450	Persentase daerah yang memiliki logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
451	Persentase kelurahan tangguh bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
452	Persentase Kelurahan Tangguh Bencana yang Terbentuk dan Aktif	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
453	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
454	Persentase korban terdampak bencana yang ditangani	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
455	Persentase Pelatihan Pencegahan dan pengurangan resiko bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
456	Persentase pelayanan publik yang berhasil dipulihkan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
457	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
458	Persentase Penanganan Korban Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
459	Persentase Penanggulangan kejadian bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
460	Persentase pengaduan kedaruratan yang direspon < 7 menit	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
461	Persentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Upaya Mitigasi Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
462	Persentase penyediaan jasa penunjang umum	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025

463	Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
464	Persentase Sarana Penanggulangan Bencana yang diadakan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
465	Persentase sistem peringatan dini / EWS yang berfungsi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
466	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
467	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
468	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
469	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
470	Peta Kejadian Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
471	Peta Risiko Bencana Banjir	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
472	Peta Risiko Bencana Banjir Bandang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
473	Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrem	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
474	Peta Risiko Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
475	Peta Risiko Bencana Gempabumi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
476	Peta Risiko Bencana Kebakaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
477	Peta Risiko Bencana Kekeringan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
478	Peta Risiko Bencana Letusan Gunung Api	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
479	Peta Risiko Bencana Tanah Longsor	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
480	Peta Risiko Bencana Tsunami	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
481	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
482	Realisasi bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
483	Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
484	Sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang dibutuhkan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
485	Sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang disediakan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
486	Skor Indeks pemulihan pasca bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
487	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
488	warga negara yang harus memperoleh layanan informasi rawan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
489	Warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
490	Banyaknya Anak Terlantar, Anak Jalanan dan Lansia Terlantar	Dinas Sosial	2025
491	Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang diusulkan	Kec. Bubutan	2025
492	Jumlah data MBR/PMKS Kecamatan yang telah terverifikasi	Kec. Bubutan	2025
493	Jumlah laporan pemberian layanan kedaruratan	Dinas Sosial	2025
494	Jumlah taman makam pahlawan yang dikelola	Dinas Sosial	2025
495	Jumlah taman makam pahlawan yang dikelola dalam kondisi baik	Dinas Sosial	2025

496	Korban bencana yang harus dilayani Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
497	Korban bencana yang harus dilayani Penyediaan Permakanan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
498	Korban bencana yang harus dilayani Penyediaan Sandang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
499	Korban bencana yang terlayani Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
500	Korban bencana yang terlayani Penyediaan Permakanan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
501	Korban bencana yang terlayani Penyediaan Sandang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
502	Persentase Penyandang Cacat yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya	Dinas Sosial	2025
503	Persentase taman makam pahlawan yang dikelola dalam kondisi baik	Dinas Sosial	2025
504	Persentase Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
505	Peta Sebaran Layanan Pengembangan Bakat dan Kreativitas Anak Disabilitas	Dinas Sosial	2025
506	Peta Sebaran Pondok Sosial	Dinas Sosial	2025
507	Tempat Penampungan Pengungsi bagi korban bencana yang disediakan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
508	Tempat Penampungan Pengungsi bagi korban bencana yang harus disediakan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
509	Warga Negara korban bencana kab/kota yang harus dilayani perlindungan dan jaminan sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
510	Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
511	Banyaknya Lowongan Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	2025
512	Banyaknya Pencari Kerja Baru Menurut Jenis Pendidikan yang Ditamatkan	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	2025
513	Ikhtisar Statistik Antar Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	2025
514	Jumlah Peserta Sertifikasi menurut Jenis Sertifikasi	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	2025
515	Jumlah Peserta Sertifikasi Umum dan Pasca Pelatihan	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	2025
516	Data terpilah gender	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025
517	Indeks pembangunan keluarga (ibangga)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025
518	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025
519	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025

520	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025
521	Jumlah Kelurahan Ramah Anak sampai dengan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025
522	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025
523	Jumlah lembaga/PKBM se Kota Surabaya	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025
524	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025
525	Jumlah organisasi perempuan di kota surabaya	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025
526	Jumlah organisasi perempuan yang mendapatkan capacity building di bidang ipoleksosbud	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025
527	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025
528	Nilai Peringkat Puspaga yang berhasil dicapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025
529	Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan khusus anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025
530	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025
531	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025

532	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2025
533	Luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	2025
534	Persentase penyediaan tanah dan/ atau bangunan untuk kepentingan umum	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	2025
535	Banyaknya Penyapu/Pasukan Kuning per Wilayah	Dinas Lingkungan Hidup	2025
536	Indeks Kualitas Air	Dinas Lingkungan Hidup	2025
537	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS)	Dinas Lingkungan Hidup	2025
538	Indeks kualitas udara	Dinas Lingkungan Hidup	2025
539	Indeks Kualitas Udara	Dinas Lingkungan Hidup	2025
540	Indeks Kualitas Udara	Dinas Lingkungan Hidup	2025
541	Jenis kualitas lingkungan yang dimonitoring selama 1 tahun	Dinas Lingkungan Hidup	2025
542	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dinas Lingkungan Hidup	2025
543	Jumlah fasilitas pengelolaan sampah dengan teknologi tepat guna	Dinas Lingkungan Hidup	2025
544	Jumlah fasilitas pengelolaan sampah dengan teknologi tepat guna yang dibangun	Dinas Lingkungan Hidup	2025
545	Jumlah hasil analisa yang memenuhi mutu kelas air	Dinas Lingkungan Hidup	2025
546	jumlah hasil monitoring udara ambien dalam waktu tertentu yang memenuhi baku mutu	Dinas Lingkungan Hidup	2025
547	Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup yang di usulkan	Dinas Lingkungan Hidup	2025
548	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki pembangunan TPA baru (kab/kota)	Dinas Lingkungan Hidup	2025
549	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki TPS3R (kab/kota)	Dinas Lingkungan Hidup	2025
550	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki TPST (kab/kota)	Dinas Lingkungan Hidup	2025
551	Jumlah kegiatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan yang dibutuhkan	Dinas Lingkungan Hidup	2025
552	Jumlah lingkungan yang dibina	Dinas Lingkungan Hidup	2025
553	Jumlah Lokasi Jamban yang Telah Dibuat per Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup	2025
554	Jumlah lokasi pengangkutan sampah	Dinas Lingkungan Hidup	2025
555	Jumlah lokasi/wilayah bersih dari sampah	Dinas Lingkungan Hidup	2025
556	Jumlah Luas Ruang Terbuka Hijau	Dinas Lingkungan Hidup	2025
557	Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diperoleh	Dinas Lingkungan Hidup	2025
558	jumlah rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Dinas Lingkungan Hidup	2025
559	Jumlah rumah tangga yang terlayani TPS3R (RT)	Dinas Lingkungan Hidup	2025
560	Jumlah rumah tangga yang terlayani TPST (RT)	Dinas Lingkungan Hidup	2025
561	Jumlah sampah yang diolah di TPS 3R	Dinas Lingkungan Hidup	2025

562	Jumlah sampah yang masuk TPS 3R	Dinas Lingkungan Hidup	2025
563	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Dinas Lingkungan Hidup	2025
564	Jumlah seluruh analisa dalam 1 tahun	Dinas Lingkungan Hidup	2025
565	Jumlah seluruh hari monitoring dalam 1 tahun	Dinas Lingkungan Hidup	2025
566	Jumlah Stasiun Pemantauan Kualitas Udara Ambien (SPKUA) yang digunakan untuk menentukan ISPU kota dalam 1 tahun	Dinas Lingkungan Hidup	2025
567	Jumlah Taman Kota dan Luasnya yang Dikelola Oleh Pemerintah Kota Surabaya	Dinas Lingkungan Hidup	2025
568	Kualitas air permukaan sebagai air baku	Dinas Lingkungan Hidup	2025
569	Kualitas Udara menurut Lokasi Pengukuran per Hari	Dinas Lingkungan Hidup	2025
570	Laju Timbulan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup	2025
571	Luas Tanah Makam Milik Pemerintah Kota Surabaya Menurut Cabang Makam per Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup	2025
572	Luas Wilayah Kota Surabaya	Sekretariat Daerah	2025
573	Nilai IEU	Dinas Lingkungan Hidup	2025
574	Persentase Peningkatan status mutu air dalam kondisi Baik	Dinas Lingkungan Hidup	2025
575	Persentase Peningkatan udara Ambien dalam kondisi memenuhi baku mutu	Dinas Lingkungan Hidup	2025
576	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya	Dinas Lingkungan Hidup	2025
577	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Dinas Lingkungan Hidup	2025
578	Persentase sampah nasional yang terkelola	Dinas Lingkungan Hidup	2025
579	Persentase sampah yg dikelola	Dinas Lingkungan Hidup	2025
580	Persentase sampah yg dikelola	Dinas Lingkungan Hidup	2025
581	Status mutu air memenuhi	Dinas Lingkungan Hidup	2025
582	Status mutu air tercemar berat	Dinas Lingkungan Hidup	2025
583	Status mutu air tercemar ringan	Dinas Lingkungan Hidup	2025
584	Status mutu air tercemar sedang	Dinas Lingkungan Hidup	2025
585	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	2025
586	Banyaknya Akte Kelahiran yang Diterbitkan per Kecamatan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2025
587	Banyaknya Akte Kematian yang Diterbitkan per Kecamatan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2025
588	Banyaknya akte yang diterbitkan menurut jenisnya per bulan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2025
589	Banyaknya Kartu Keluarga Baru yang Diterbitkan Per Kecamatan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2025

590	Banyaknya kelahiran yang dilaporkan per kecamatan hasil registrasi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2025
591	Banyaknya kematian yang dilaporkan per kecamatan hasil registrasi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2025
592	Banyaknya KTP yang diterbitkan menurut kewarganegaraannya	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2025
593	banyaknya laporan pengaduan layanan adminduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2025
594	Banyaknya penduduk (WNI dan WNA) menurut agama dan jenis kelamin per kecamatan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2025
595	Banyaknya penduduk (WNI dan WNA) menurut jenis kelamin dan usia per kecamatan Hasil Registrasi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2025
596	Banyaknya penduduk (WNI dan WNA) menurut pekerjaan dan jenis kelamin per kecamatan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2025
597	Banyaknya penduduk (WNI dan WNA) menurut pendidikan dan jenis kelamin per kecamatan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2025
598	Banyaknya penduduk (WNI) menurut jenis kelamin hasil registrasi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2025
599	Banyaknya penduduk menurut jenis kelamin per Kecamatan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2025
600	Banyaknya penduduk menurut kewarganegaraan dan jenis kelamin per kecamatan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2025
601	Banyaknya Penduduk Pindah Keluar per Kecamatan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2025
602	Banyaknya penduduk pindah keluar per kecamatan hasil registrasi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2025
603	Banyaknya Penduduk Pindah Masuk per Kecamatan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2025
604	Banyaknya penduduk pindah masuk per kecamatan hasil registrasi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2025
605	Banyaknya penduduk yang mengurus akte kelahiran menurut kewarganegaraan per Bulan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2025
606	Banyaknya penduduk yang mengurus akte kematian menurut kewarganegaraan per Bulan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2025
607	Banyaknya Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, presentase penduduk, kepadatan penduduk per km2, dan rasio jenis kelamin per Kecamatan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2025

608	Banyaknya Penerbitan Kartu Identitas Anak per Kecamatan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2025
609	Jenis informasi yang dimutakhirkan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2025
610	Jumlah data penduduk kementrian bersih	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2025
611	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2025
612	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2025
613	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2025
614	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2025
615	Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2025
616	Jumlah Dokumen Pendaftaran Penduduk yang diterbitkan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2025
617	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2025
618	Jumlah inovasi daerah untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan reformasi birokrasi di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2025
619	Jumlah jenis informasi yang dilaporkan dalam dokumen Profil Perkembangan Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2025
620	Jumlah layanan yg telah berbasis IT	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2025
621	Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2025
622	Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerja sama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2025
623	Jumlah penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2025
624	Jumlah Penduduk 13-65 Tahun	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2025
625	Jumlah penduduk menurut jenis kelamin	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2025

626	Jumlah penduduk menurut kelompok umur	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2025
627	Jumlah penduduk usia 13-15 tahun	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2025
628	Jumlah penduduk usia 4-6 tahun	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2025
629	Jumlah penduduk usia 7-12 tahun	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2025
630	Nilai Kepuasan Masyarakat pada Layanan Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2025
631	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2025
632	Persentase cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2025
633	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2025
634	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2025
635	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2025
636	Peta Jumlah Penduduk Usia Sekolah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2025
637	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2025
638	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2025
639	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register).	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2025
640	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025
641	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025

642	Angka Kelahiran Total (TFR)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025
643	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern).	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025
644	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025
645	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025
646	Banyaknya Akseptor Baru Menurut Metode Kontrasepsi Per Kecamatan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025
647	Banyaknya Fasilitas Kesehatan KB per Kecamatan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025
648	Banyaknya Peserta KB Aktif Menurut Metode Kontrasepsi per Kecamatan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025
649	Banyaknya Petugas Keluarga Berencana per Kecamatan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025
650	Indeks Bangga Kencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025
651	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025
652	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025
653	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025

654	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025
655	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025
656	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025
657	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025
658	Jumlah Kecamatan yang melaksanakan Mini Lokakarya	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025
659	Jumlah kelompok kegiatan UPPKA yang didampingi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025
660	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025
661	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025
662	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025
663	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025
664	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025

665	Jumlah laporan kegiatan penyediaan biaya operasional bagi kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (DAK)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025
666	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025
667	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan di Kampung KB	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025
668	Jumlah laporan pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025
669	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025
670	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025
671	Jumlah laporan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025
672	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025
673	Jumlah mitra kerja yang mendapat sosialisasi kependudukan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025
674	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025
675	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025

676	Jumlah pasangan usia subur	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025
677	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan kontrasepsi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025
678	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan kontrasepsi modern	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025
679	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang sedang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025
680	Jumlah pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi modern (mCPR)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025
681	Jumlah pasangan usia subur yang tidak terpenuhi kebutuhan ber KB	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025
682	Jumlah Penduduk Usia 60 ke atas	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2025
683	Jumlah Pertemuan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB / PLKB) bersama dengan kader IMP	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025
684	Jumlah peserta KB aktif	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025
685	Jumlah peserta sosialisasi pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025
686	jumlah peserta UPPKA	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025
687	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025

688	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025
689	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025
690	Persentase kebutuhan ber KB dari pasangan usia subur yang tidak terpenuhi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025
691	Persentase mitra kerja yang paham pengetahuan kependudukan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025
692	Persentase pasangan usia subur yang berpartisipasi dalam penggunaan alat kontrasepsi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025
693	Persentase pasangan usia subur/PUS (15-49 tahun) yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menunda anak tetapi tidak menggunakan metode kontrasepsi (unmet need)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025
694	Persentase pemerintah daerah yang memiliki kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025
695	Persentase peserta KB aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025
696	Persentase peserta UPPKA yang meningkat pendapatannya	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025
697	Peserta UPPKA yang meningkat pendapatannya	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025
698	Peta angka prevalensi kontrasepsi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025
699	Peta angka prevalensi kontrasepsi modern	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025

700	Peta persentase perempuan usia reproduksi yang kebutuhan KB tidak terpenuhi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025
701	presentase peserta KB dengan pasangan usia subur)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025
702	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. (kelompok penduduk 40% terbawah)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025
703	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025
704	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025
705	Rata-rata kelahiran menurut kelompok umur 15 - 19 (ASFR / Age Spesific Fertility Rate) per 1000 wanita	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025
706	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025
707	Arus Kendaraan dan Penumpang yang Datang dan Berangkat Menurut Jenis Kendaraan Melalui Terminal Bratang per Bulan	Dinas Perhubungan	2025
708	Arus kendaraan dan penumpang yang datang dan berangkat menurut jenis kendaraan melalui terminal Joyoboyo per Bulan	Dinas Perhubungan	2025
709	Arus Kendaraan dan Penumpang yang Datang dan Berangkat Menurut Jenis Kendaraan Melalui Terminal Tambak Osowilangun per Bulan	Dinas Perhubungan	2025
710	Banyaknya Kendaraan Angkutan Penumpang Umum Dalam Kota Menurut Rute/Jalur	Dinas Perhubungan	2025
711	Banyaknya Kendaraan Bermotor Umum dan Bukan Umum yang Lulus Uji di UPTD Wiyung	Dinas Perhubungan	2025
712	Banyaknya Kendaraan Bermotor Umum dan Bukan Umum yang Telah Diuji Berkala di UPTD Tandes	Dinas Perhubungan	2025
713	Banyaknya Kendaraan Bermotor Umum dan Bukan Umum yang Telah Diuji Pertama Kali di UPTD Tandes	Dinas Perhubungan	2025

714	Banyaknya Kendaraan Bermotor Umum dan Bukan Umum yang Tidak Datang Uji di UPTD Tandes	Dinas Perhubungan	2025
715	Banyaknya Kendaraan Bermotor Umum dan Bukan Umum yang Tidak Lulus Uji di UPTD Tandes	Dinas Perhubungan	2025
716	Banyaknya Kendaraan Bermotor Umum dan Bukan Umum yang Tidak Lulus Uji di UPTD Wiyung	Dinas Perhubungan	2025
717	Banyaknya Kendaraan Bermotor Wajib Uji di UPTD Tandes Menurut Jenisnya	Dinas Perhubungan	2025
718	Banyaknya Unit Suroboyo Bus Dan Jumlah Penumpang Per Tahun	Dinas Perhubungan	2025
719	Cakupan layanan angkutan umum di Kota Surabaya	Dinas Perhubungan	2025
720	Indeks Penyelenggaraan Transportasi	Dinas Perhubungan	2025
721	Jumlah angkutan umum yang beroperasi	Dinas Perhubungan	2025
722	Jumlah Armada Angkutan Perbatasan (Bus Kota) dan mikrolet	Dinas Perhubungan	2025
723	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dinas Perhubungan	2025
724	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Dinas Perhubungan	2025
725	Jumlah Implementasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Dinas Perhubungan	2025
726	Jumlah jalan kewenangan kota tertentu yang memiliki V/C ratio ≤ 0.90	Dinas Perhubungan	2025
727	Jumlah jaringan transportasi Multimoda yang terintegrasi	Dinas Perhubungan	2025
728	Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Perairan	Dinas Perhubungan	2025
729	Jumlah Kegiatan Pengembangan, Penetapan Kebijakan, dan Sosialisasi Keselamatan serta Rencana Induk Perkeretaapian	Dinas Perhubungan	2025
730	Jumlah kendaraan angkutan umum dalam trayek yang berizin dan beroperasi	Dinas Perhubungan	2025
731	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Lulus Uji KIR	Dinas Perhubungan	2025
732	Jumlah Kendaraan Mutasi Keluar Melalui UPTD Tandes menurut Jenis Kendaraan per Bulan	Dinas Perhubungan	2025
733	Jumlah Kendaraan Mutasi Masuk Melalui UPTD Tandes menurut Jenis Kendaraan per Bulan	Dinas Perhubungan	2025
734	Jumlah Kendaraan Numpang Uji Keluar Melalui UPTD Tandes Menurut Jenis Kendaraan per Bulan	Dinas Perhubungan	2025
735	Jumlah Kendaraan Numpang Uji Masuk Melalui UPTD Tandes Menurut Jenis Kendaraan per Bulan	Dinas Perhubungan	2025
736	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	2025
737	Jumlah laporan Peningkatan Pelayanan BLUD Pengelolaan Transportasi Umum	Dinas Perhubungan	2025
738	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinas Perhubungan	2025

739	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan Abdi Yasa Teladan	Dinas Perhubungan	2025
740	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Perhubungan	2025
741	Jumlah penetapan jaringan trayek angkutan umum perkotaan	Dinas Perhubungan	2025
742	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Dinas Perhubungan	2025
743	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Dinas Perhubungan	2025
744	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Dinas Perhubungan	2025
745	Jumlah Target jaringan transportasi Multimoda yang ditentukan	Dinas Perhubungan	2025
746	Jumlah Target Kegiatan Pengembangan dan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Perairan	Dinas Perhubungan	2025
747	Jumlah target Kegiatan Pengembangan dan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Perkeretaapian	Dinas Perhubungan	2025
748	Jumlah Terminal Angkutan Umum yang Dikelola selama 12 bulan	Dinas Perhubungan	2025
749	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Dinas Perhubungan	2025
750	Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota	Dinas Perhubungan	2025
751	Konektivitas jaringan transportasi Multimoda yang terintegrasi	Dinas Perhubungan	2025
752	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	2025
753	Persentase angkutan umum dalam trayek yang memenuhi ketentuan perijinan	Dinas Perhubungan	2025
754	Persentase Jalan Kewenangan Kota Dengan V/C Ratio $\leq 0,90$	Dinas Perhubungan	2025
755	Persentase kepuasan masyarakat dalam menggunakan angkutan umum perkotaan di Kota Surabaya	Dinas Perhubungan	2025
756	Persentase kepuasan masyarakat terkait operasional Prasarana dan Perlengkapan Jalan di Kota Surabaya	Dinas Perhubungan	2025
757	Persentase penduduk terlayani transportasi umum	Dinas Perhubungan	2025
758	Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas	Dinas Perhubungan	2025
759	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Umum	Dinas Perhubungan	2025
760	Peta Rute Transportasi Umum	Dinas Perhubungan	2025
761	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik	Dinas Perhubungan	2025
762	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang disabilitas	Dinas Perhubungan	2025
763	Rata-rata load factor Angkutan Feeder	Dinas Perhubungan	2025
764	Rata-rata load factor Angkutan Trunk	Dinas Perhubungan	2025
765	Rata-rata Load Factor Angkutan Trunk dan Feeder	Dinas Perhubungan	2025
766	Rata-rata Load Factor Angkutan Umum Perkotaan Surabaya	Dinas Perhubungan	2025
767	Rata-rata load factor Bus Pelajar	Dinas Perhubungan	2025

768	Rata-rata load factor Suroboyo Bus	Dinas Perhubungan	2025
769	Rute Suroboyo Bus	Dinas Perhubungan	2025
770	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Dinas Perhubungan	2025
771	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dinas Komunikasi dan Informatika	2025
772	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan pendampingan dalam penyusunan masterplan smart city	Dinas Komunikasi dan Informatika	2025
773	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Komunikasi dan Informatika	2025
774	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Komunikasi dan Informatika	2025
775	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dinas Komunikasi dan Informatika	2025
776	Jumlah peserta pelatihan digital skill untuk menuju ekonomi digital	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	2025
777	Jumlah peserta pelatihan digital skill untuk menuju ekonomi digital	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	2025
778	Persentase K/L yang menggunakan/terhubung Jaringan Intra Pemerintah (JIP/Government Network)	Dinas Komunikasi dan Informatika	2025
779	Persentase K/L/D yang memanfaatkan cloud pemerintah	Dinas Komunikasi dan Informatika	2025
780	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik	Dinas Komunikasi dan Informatika	2025
781	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)	Dinas Komunikasi dan Informatika	2025
782	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Komunikasi dan Informatika	2025
783	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	Dinas Komunikasi dan Informatika	2025
784	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	Dinas Komunikasi dan Informatika	2025
785	Persentase pengguna internet	Dinas Komunikasi dan Informatika	2025
786	Peta Sebaran BLC	Dinas Komunikasi dan Informatika	2025
787	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Dinas Komunikasi dan Informatika	2025
788	Banyaknya Anggota, Manager dan Karyawan Koperasi Menurut Jenisnya	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	2025
789	Banyaknya Anggota, Manager dan Karyawan Koperasi Menurut Kecamatan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	2025
790	Banyaknya Koperasi Aktif dan Tidak Aktif menurut Jenisnya	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	2025
791	Banyaknya Koperasi Aktif dan Tidak Aktif Per Kecamatan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	2025
792	Banyaknya Koperasi Aktif, Tidak Aktif, dan Jumlah Anggota menurut Kecamatan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	2025
793	Banyaknya Modal , Volume Usaha dan SHU Menurut Jenis Koperasi	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	2025

794	Banyaknya Modal , Volume Usaha dan SHU Menurut Kecamatan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	2025
795	Banyaknya Operasi Pasar, target, dan capaian Kota Surabaya	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	2025
796	Banyaknya Sentra UKM	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	2025
797	Jumlah koperasi aktif RAT	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	2025
798	Jumlah Koperasi yang memiliki Badan Hukum Koperasi	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	2025
799	Jumlah pasar tradisional/rakyat	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	2025
800	Jumlah pasar tradisional/rakyat	Sekretariat Daerah	2025
801	Jumlah pelaku usaha mikro yang meningkat skala kinerja usahanya	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	2025
802	Jumlah Pelaku Usaha Pasar Binaan menurut Kecamatan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	2025
803	Jumlah Pelaku Usaha Pasar Binaan menurut Kecamatan	Sekretariat Daerah	2025
804	Jumlah Pembentukan/Pengembangan Koperasi Berbasis Komoditas di Kalangan Kelompok Strategis	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	2025
805	Jumlah Potensi Usaha yang didata	Kec. Bubutan	2025
806	Jumlah potensi usaha yang telah ber-NIB	Kec. Bubutan	2025
807	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	2025
808	Jumlah volume usaha koperasi	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	2025
809	Nilai SAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	2025
810	Peta sebaran pasar tradisional/rakyat	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	2025
811	Peta sebaran toko kelontong	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	2025
812	Banyaknya Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang Diterbitkan berdasarkan Kecamatan dan Skala Usaha	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2025
813	Banyaknya Nomor Induk Berusaha (NIB) berdasarkan Kategori Status Penanaman Modal (PMA, PMDN, dan Non PA/PMDN)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2025

814	Indeks Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2025
815	jumlah berkas Pelayanan Perizinan Berusaha, Pelayanan Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan yang telah diterbitkan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2025
816	Jumlah Calon Investor / Investor Yang Memperoleh Informasi Peluang dan Potensi Investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2025
817	Jumlah Calon Investor / Investor yang Mempunyai Minat Berinvestasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2025
818	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2025
819	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2025
820	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2025
821	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2025
822	Jumlah Investor PMA/PMDN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2025
823	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2025
824	Jumlah kegiatan usaha yang ijin usahanya dilakukan pemantauan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2025
825	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2025
826	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2025
827	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2025
828	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2025
829	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2025

830	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2025
831	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal yang selesai	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2025
832	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal yang tepat waktu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2025
833	Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2025
834	jumlah permohonan pemanfaatan data investasi dan penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2025
835	Jumlah permohonan pemanfaatan data investasi penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2025
836	Jumlah permohonan pemanfaatan data investasi penanaman modal yang valid	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2025
837	Jumlah perusahaan yang dilakukan evaluasi kinerja penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2025
838	Jumlah perusahaan yang mengikuti bimtek dan menyampaikan LKPM	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2025
839	Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang telah di bimtek maupun yang belum mengikuti bimtek	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2025
840	Jumlah PMA dan Nilai PMA menurut Wilayah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2025
841	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2025
842	Jumlah Proyek yang masuk dalam Daftar Rencana Proyek KPBU dengan status siap ditawarkan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2025
843	Jumlah Usaha yang Sesuai dengan Peta Potensi dan Peluang Investasi Kota Surabaya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2025
844	Ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2025
845	Nilai Investasi Daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2025
846	Nilai Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2025

847	Perkembangan Investasi Non PMA/PMDN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2025
848	Persentase Calon Investor / Investor yang Mempunyai Minat Berinvestasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2025
849	Persentase Kesesuaian Usaha Terhadap Peta Potensi dan Peluang Usaha	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2025
850	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2025
851	Persentase Ketersediaan Barang dan Jasa	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2025
852	Persentase pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2025
853	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2025
854	Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dibandingkan dengan perusahaan yang mengikuti bimbingan teknis	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2025
855	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2025
856	Total jumlah usaha yang berpeluang investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2025
857	Banyaknya Olahraga Rekreasi yang Digali, Dibina, dan Dikembangkan Menurut Jenisnya	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	2025
858	Jumlah Atlet dan Pelatih yang Berprestasi dan Dibina menurut Cabang Olahraga	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	2025
859	Jumlah atlit yang dikirim ke event olahraga regional, nasional dan/atau internasional	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	2025
860	Jumlah fasilitas olahraga yang dibangun dan/atau ditingkatkan	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	2025
861	Jumlah Klub Olahraga	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	2025
862	Jumlah Lapangan Olahraga Menurut Jenis Lapangan per Kecamatan	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	2025
863	Jumlah medali yang didapatkan atlit pada event olahraga regional, nasional dan/atau internasional	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	2025

864	Jumlah organisasi keolahragaan berbasis Olimpik yang memenuhi standar minimal keolahragaan	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	2025
865	Jumlah talenta muda	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	2025
866	Jumlah tenaga keolahragaan Olimpik/Paralimpik yang bersertifikat internasional	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	2025
867	Persentase PPLPD di tingkat kabupaten/kota yang telah terstandarisasi dan fokus membina cabang olahraga prioritas sesuai Desain Besar Olahraga Nasional	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	2025
868	Jumlah data statistik dianalisa	Dinas Komunikasi dan Informatika	2025
869	Jumlah data statistik yang dibutuhkan untuk publikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	2025
870	Jumlah data terpublikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	2025
871	Jumlah sektor yang dianalisa	Dinas Komunikasi dan Informatika	2025
872	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik.	Dinas Komunikasi dan Informatika	2025
873	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar.	Dinas Komunikasi dan Informatika	2025
874	Peta proporsi keluarga dengan fasilitas sanitasi layak	Dinas Kesehatan	2025
875	Indeks Harmoni Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2025
876	Indeks Harmoni Sosial	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	2025
877	Indeks Harmoni Sosial	Dinas Lingkungan Hidup	2025
878	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	2025
879	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	2025
880	Jumlah museum dan bangunan sejarah yang dikelola	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	2025
881	Jumlah museum yang berhasil dikembangkan	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	2025
882	Jumlah museum yang dikelola	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	2025
883	Jumlah museum yang telah distandardisasi	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	2025
884	Jumlah narasi sejarah yang dipublikasikan	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	2025
885	Peta Cagar Budaya	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	2025

886	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP)	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	2025
887	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2025
888	Banyaknya Buku yang Dipinjam Menurut Golongan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2025
889	Banyaknya Kartu Perpustakaan yang Dicitak Menurut Statusnya	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2025
890	Banyaknya Peminjam Buku Perpustakaan Menurut Statusnya	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2025
891	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2025
892	Jumlah event literasi yang diselenggarakan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2025
893	Jumlah Koleksi Judul Buku E Book dan Non E Book Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2025
894	Jumlah Kunjungan Perpustakaan Umum dan Taman Bacaan Masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2025
895	Jumlah perpustakaan yang tergabung dalam jejaring nasional perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2025
896	Jumlah peserta yang mengikuti pembudayaan kegemaran membaca dan literasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2025
897	Jumlah Pojok Baca Digital di daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2025
898	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2025
899	Peta sebaran perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2025
900	Peta sebaran Taman Baca Masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2025
901	Arsip yang dialih mediakan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2025
902	indeks pelayanan kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2025
903	Jumlah arsip statis	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2025
904	Jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2025
905	Jumlah BUMD yang diawasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2025
906	Jumlah Perangkat Daerah (PD) selain RSUD	Sekretariat Daerah	2025
907	Perkembangan Anggota Perpustakaan Menurut Statusnya	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2025
908	Banyaknya Penangkapan Ikan Menurut Jenisnya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2025
909	Hasil Produksi Sektor Perikanan dan Kelautan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2025
910	Jumlah kasus nelayan yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2025
911	Jumlah masyarakat kelautan perikanan yang ditingkatkan kompetensinya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2025
912	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2025
913	Jumlah perikanan hasil budidaya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2025
914	Jumlah perikanan hasil tangkapan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2025
915	Jumlah Produksi Berdasarkan Komoditas Ikan Utama	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2025
916	Jumlah produksi hasil Perikanan Tangkap dan Budidaya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2025
917	Jumlah Produksi ikan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2025
918	Jumlah sentra ikan yang dikelola	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2025

919	Peta Sebaran Perikanan Budidaya 1:50.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2025
920	Produksi Ikan Darat Menurut Tempat Penangkapan dan Jenis Ikan (Ton)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2025
921	Produksi Ikan Laut Menurut Lokasi Penangkapan dan Jenisnya (Ton)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2025
922	Rata-rata hasil tangkapan yang dilaporkan dalam 5 (lima) tahun terakhir (ton)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2025
923	Total hasil produksi perikanan tangkap	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2025
924	Banyaknya Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara menurut Tempat Wisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	2025
925	Jumlah daya tarik dan destinasi wisata yang dikembangkan	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	2025
926	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	2025
927	Jumlah destinasi pariwisata yang ditingkatkan aksesibilitas, amenitas, dan atraksi	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	2025
928	Jumlah destinasi pariwisata yang ditingkatkan aksesibilitas, amenitas, dan atraksi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2025
929	Jumlah destinasi wisata Kota Surabaya	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	2025
930	Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	2025
931	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	2025
932	Jumlah Event Menurut Kategori	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	2025
933	Jumlah fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas dan sertifikasi kompetensi pada pelaku ekonomi kreatif	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	2025
934	Jumlah fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas dan sertifikasi kompetensi pada pelaku ekonomi kreatif	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2025
935	Jumlah Hotel Berdasarkan Tingkat Risiko dan Kecamatan di Kota Surabaya	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	2025
936	Jumlah Hotel Berdasarkan Tingkat Risiko dan Kecamatan di Kota Surabaya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2025
937	Jumlah Hotel Berdasarkan Tingkat Risiko dan Kecamatan di Kota Surabaya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	2025
938	Jumlah jenis kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	2025

939	Jumlah Kawasan wisata bahari yang dikelola	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	2025
940	Jumlah Kawasan wisata bahari yang dikelola	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2025
941	Jumlah Kawasan wisata bahari yang dikelola	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2025
942	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	2025
943	Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	2025
944	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara di Kota Surabaya	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	2025
945	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	2025
946	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	2025
947	Jumlah laporan pelaksanaan Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataaan bagi Masyarakat	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	2025
948	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	2025
949	Jumlah lokasi daya tarik wisata yang dikelola	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	2025
950	Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	2025
951	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	2025
952	Jumlah produk ekonomi kreatif yang bisa ditampilkan	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	2025
953	Jumlah produk ekonomi kreatif yang dihasilkan	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	2025
954	Jumlah Resto Berdasarkan Tingkat Risiko dan Kecamatan di Kota Surabaya	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	2025
955	Jumlah Resto Berdasarkan Tingkat Risiko dan Kecamatan di Kota Surabaya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2025
956	Jumlah Resto Berdasarkan Tingkat Risiko dan Kecamatan di Kota Surabaya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	2025

957	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	2025
958	Jumlah standar layanan dan pengelolaan di sektor pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	2025
959	Jumlah wisatawan mancanegara	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	2025
960	Jumlah wisatawan mancanegara	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	2025
961	Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	2025
962	Persentase pemulihan kunjungan wisatawan di Kota Surabaya	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	2025
963	Persentase pemulihan kunjungan wisatawan di obyek wisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	2025
964	Peta sebaran museum	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	2025
965	Banyaknya Produksi Tanaman Buah-buahan Menurut Jenis Tanaman (Ton)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2025
966	Banyaknya Tanaman Buah-buahan yang memproduksi Menurut Jenis Tanaman (Pohon)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2025
967	Banyaknya Ternak yang dipotong Menurut Lokasi Pemotongan dan Jenisnya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2025
968	Banyaknya Vaksinasi Avian Influenza (Flu Burung) Menurut Jenis Hewan dan Lokasi Vaksin	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2025
969	Jenis Komoditas Unggulan Sektor Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2025
970	Jumlah bantuan unit pengolahan pupuk organik yang disalurkan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2025
971	Jumlah hewan sehat	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2025
972	Jumlah Jenis Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2025
973	Jumlah kelompok masyarakat yang disuluh	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2025
974	Jumlah pelaksanaan pendampingan unit usaha dan produk asal hewan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2025
975	Jumlah pembudidaya ternak yang memproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2025
976	Jumlah penyuluh yang mengikuti bimtek/pelatihan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2025
977	Jumlah populasi hewan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2025
978	Jumlah populasi hewan ternak	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2025
979	Jumlah populasi hewan ternak yang mendapatkan vaksinasi dan pengobatan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2025
980	Jumlah Produksi Komoditas Pertanian atau Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2025

981	Jumlah produksi komoditas pertanian sektor hortikultura	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2025
982	Jumlah SDM yang Mengikuti Pelatihan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2025
983	Jumlah UMKM KP yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi Hulu Hilir	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2025
984	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2025
985	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2025
986	Luas panen komoditas pertanian sektor hortikultura	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2025
987	Luas panen komoditas pertanian sektor hortikultura	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2025
988	Luas Panen Tanaman Pangan Menurut Jenisnya (Ha)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2025
989	Luas Total Lahan Pertanian Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2025
990	Persentase hewan sehat yang telah diintervensi pelayanan kesehatan hewan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2025
991	Persentase populasi ternak yang mendapatkan vaksinasi dan pengobatan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2025
992	Peta Lahan Pertanian Tanaman Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2025
993	Populasi Ternak dan Unggas Menurut Jenisnya per Kecamatan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2025
994	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	2025
995	Jumlah diklat pemasaran digital	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	2025
996	Jumlah diklat pemasaran digital	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	2025
997	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	2025
998	Jumlah intervensi ketersediaan komoditas	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	2025
999	Jumlah kejadian gejolak harga	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	2025
1000	Jumlah Laporan hasil Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	2025
1001	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Metrologi Legal	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	2025
1002	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	2025
1003	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	2025
1004	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	2025

1005	Jumlah Laporan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	2025
1006	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	2025
1007	Jumlah pelaku usaha distribusi perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	2025
1008	Jumlah pelaku usaha distribusi perdagangan yang difasilitasi	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	2025
1009	Jumlah pelayanan tera yang tepat waktu	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	2025
1010	Jumlah potensi UTTP yang menjadi kewenangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	2025
1011	Jumlah UTTP yang bertanda tera sah	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	2025
1012	Persentase Alat UTTP bertanda tera sah	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	2025
1013	Persentase intervensi ketersediaan komoditas	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	2025
1014	Persentase pelaku usaha distribusi perdagangan yang difasilitasi	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	2025
1015	Persentase pelayanan tera yang tepat waktu	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	2025
1016	Persentase peningkatan arus barang melalui tanjung perak	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	2025
1017	Persentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	2025
1018	Peta sebaran gudang	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	2025
1019	Peta sebaran pusat perbelanjaan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	2025
1020	Peta sebaran pusat perbelanjaan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2025
1021	Peta sebaran toko swalayan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	2025
1022	Tingkat stabilitas harga komoditas	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	2025

1023	Tingkat stabilitas harga komoditas	Sekretariat Daerah	2025
1024	Total arus barang tanjung perak	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	2025
1025	Banyaknya Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga per Kecamatan	Kecamatan	2025
1026	Banyaknya Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga per Kecamatan	Sekretariat Daerah	2025
1027	Banyaknya Wilayah Kerja Sesuai dengan Wilayah Kerja Pembantu Walikota di Wilayah Kota Surabaya	Sekretariat Daerah	2025
1028	Indeks Reformasi Birokrasi tingkat Kab/Kota	Sekretariat Daerah	2025
1029	Jumlah Balai RW	Kecamatan	2025
1030	Jumlah Balai RW	Sekretariat Daerah	2025
1031	Jumlah BUMD yang berhasil dibina	Sekretariat Daerah	2025
1032	Jumlah Daerah yang melaksanakan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) - Kementerian Dalam Negeri	Sekretariat Daerah	2025
1033	Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah	Sekretariat Daerah	2025
1034	Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun.	Sekretariat Daerah	2025
1035	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Sekretariat Daerah	2025
1036	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Sekretariat Daerah	2025
1037	Jumlah evaluasi kerjasama yang dilakukan	Sekretariat Daerah	2025
1038	Jumlah indikator program Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	2025
1039	Jumlah indikator program Sekretariat Daerah yang memiliki capaian lebih dari atau sama dengan 85%	Sekretariat Daerah	2025
1040	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik pada Laboratorium Inovasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2025
1041	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik pada Laboratorium Inovasi	Sekretariat Daerah	2025
1042	Jumlah instansi yang memiliki nilai akuntabilitas kinerjanya minimal A	Sekretariat Daerah	2025
1043	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Sekretariat Daerah	2025
1044	Jumlah kegiatan keseluruhan	Sekretariat Daerah	2025
1045	Jumlah kegiatan yang serapan anggarannya lebih dari atau sama dengan 76%	Sekretariat Daerah	2025
1046	Jumlah kelurahan tertinggal	Sekretariat Daerah	2025
1047	Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang direncanakan mendapatkan dana penunjang operasional	Sekretariat Daerah	2025
1048	Jumlah kerja sama dalam negeri yang dievaluasi	Sekretariat Daerah	2025
1049	Jumlah kerja sama luar negeri yang dievaluasi	Sekretariat Daerah	2025
1050	Jumlah kerjasama dalam negeri yang dievaluasi	Sekretariat Daerah	2025

1051	Jumlah kerjasama dalam negeri yang difasilitasi	Sekretariat Daerah	2025
1052	Jumlah kerjasama luar negeri yang berlaku	Sekretariat Daerah	2025
1053	Jumlah kerjasama luar negeri yang dievaluasi	Sekretariat Daerah	2025
1054	Jumlah kerjasama luar negeri yang difasilitasi	Sekretariat Daerah	2025
1055	Jumlah kerjasama luar negeri yang difasilitasi	Sekretariat Daerah	2025
1056	Jumlah kerjasama yang direncanakan dievaluasi	Sekretariat Daerah	2025
1057	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Sekretariat Daerah	2025
1058	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Sekretariat Daerah	2025
1059	Jumlah laporan pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	2025
1060	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sekretariat Daerah	2025
1061	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sekretariat Daerah	2025
1062	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sekretariat Daerah	2025
1063	Jumlah naskah kerjasama dalam negeri	Sekretariat Daerah	2025
1064	Jumlah naskah kerjasama dalam negeri yang direalisasikan	Sekretariat Daerah	2025
1065	Jumlah nilai investasi proyek KPBU berdasarkan tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi.	Sekretariat Daerah	2025
1066	Jumlah PD yang dilakukan review kelembagaan	Sekretariat Daerah	2025
1067	Jumlah PD yang memiliki kesesuaian analisis jabatan dengan review kelembagaan	Sekretariat Daerah	2025
1068	Jumlah pendataan batas wilayah kecamatan	Sekretariat Daerah	2025
1069	Jumlah pengadaan barang milik daerah yang diadakan ≤ 30 Hari Kerja	Sekretariat Daerah	2025
1070	Jumlah Penyedia Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang Produknya Ditayangkan dalam Katalog Elektronik	Sekretariat Daerah	2025
1071	Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan RSUD	Sekretariat Daerah	2025
1072	Jumlah permasalahan hukum keseluruhan	Sekretariat Daerah	2025
1073	Jumlah permasalahan hukum yang ditangani	Sekretariat Daerah	2025
1074	Jumlah permasalahan hukum yang selesai ditindaklanjuti	Sekretariat Daerah	2025
1075	Jumlah Produk Dalam Negeri yang Tayang di Katalog Elektronik	Sekretariat Daerah	2025
1076	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Sekretariat Daerah	2025
1077	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Sekretariat Daerah	2025
1078	Jumlah produk hukum yang dipublikasi	Sekretariat Daerah	2025
1079	Jumlah produk hukum yang ditetapkan	Sekretariat Daerah	2025
1080	Jumlah Produk yang Tayang di Katalog Elektronik	Sekretariat Daerah	2025
1081	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Sekretariat Daerah	2025
1082	Jumlah rekomendasi kajian/evaluasi keseluruhan yang dihasilkan	Sekretariat Daerah	2025

1083	Jumlah rekomendasi kajian/evaluasi yang mendapat arahan dari pimpinan	Sekretariat Daerah	2025
1084	Jumlah RT/RW (Nasional, Pulau, Provinsi, Kabupaten, Kota)	Sekretariat Daerah	2025
1085	Jumlah seluruh desa/kelurahan	Sekretariat Daerah	2025
1086	Jumlah seluruh instansi yang dinilai akuntabilitas kerjanya	Sekretariat Daerah	2025
1087	Jumlah siklus koordinasi bidang perekonomian dan evaluasi BUMD (Analisa Stabilitas Harga dan Ketersediaan Bahan Pangan Daerah) yang dilaksanakan	Sekretariat Daerah	2025
1088	Jumlah siklus koordinasi bidang perekonomian dan evaluasi BUMD (Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil) yang dilaksanakan	Sekretariat Daerah	2025
1089	Jumlah surat masuk	Sekretariat Daerah	2025
1090	Jumlah surat masuk tersampaikan tepat waktu	Sekretariat Daerah	2025
1091	Jumlah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) berdasarkan Tingkat Kematangan	Sekretariat Daerah	2025
1092	Jumlah unit penyelenggara pelayanan yang disurvei	Sekretariat Daerah	2025
1093	Jumlah unit penyelenggara pelayanan yang disurvei dan minimal mutu pelayanannya kategori baik	Sekretariat Daerah	2025
1094	Luas Wilayah Kota Surabaya Berdasarkan Kecamatan	Sekretariat Daerah	2025
1095	Nilai Monitoring Pengadaan Barang Jasa yang Tercatat di Sistem LKPP berdasarkan KLPD	Sekretariat Daerah	2025
1096	Nilai SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2025
1097	Nilai SAKIP Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	2025
1098	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	2025
1099	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	2025
1100	Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2025
1101	Nilai SAKIP Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	2025
1102	Nilai SAKIP RSUD Bhakti Dharma Husada	RSUD Bhakti Dharma Husada	2025
1103	Nilai SAKIP RSUD dr. Mohamad Soewandhie	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	2025
1104	Nilai Transaksi Belanja Produk Dalam Negeri KLPD dan BUMN	Sekretariat Daerah	2025
1105	Nilai Transaksi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan KLPD	Sekretariat Daerah	2025
1106	Perentase jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan PD	Sekretariat Daerah	2025
1107	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks RB \geq B	Sekretariat Daerah	2025
1108	Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP \geq B	Inspektorat	2025
1109	Persentase kerja sama luar negeri yang difasilitasi	Sekretariat Daerah	2025
1110	Persentase kerjasama yang dievaluasi dan diinformasikan	Sekretariat Daerah	2025

1111	Persentase ketepatan waktu Penyediaan Jasa surat menyurat dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sekretariat Daerah	2025
1112	Persentase Naskah Kerja sama dalam negeri yang diselesaikan	Sekretariat Daerah	2025
1113	Persentase pendataan batas wilayah kecamatan	Sekretariat Daerah	2025
1114	Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti	Sekretariat Daerah	2025
1115	Persentase produk hukum yang disebarluaskan	Sekretariat Daerah	2025
1116	Persentase terlaksananya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar.	Sekretariat Daerah	2025
1117	Persentase terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	Sekretariat Daerah	2025
1118	Peta Batas Administrasi Kecamatan	Sekretariat Daerah	2025
1119	Peta Batas Administrasi Kelurahan	Sekretariat Daerah	2025
1120	Produk Hukum yang Diterbitkan menurut Jenisnya	Sekretariat Daerah	2025
1121	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik.	Sekretariat Daerah	2025
1122	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	Sekretariat Daerah	2025
1123	Banyaknya Kegiatan DPRD Kota Surabaya Menurut Jenis Kegiatan	Sekretariat DPRD	2025
1124	Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin	Sekretariat DPRD	2025
1125	Jumlah anggota parlemen laki-laki dan perempuan	Sekretariat DPRD	2025
1126	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Sekretariat DPRD	2025
1127	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah.	Sekretariat DPRD	2025
1128	Data indikator RPJMD yang dibutuhkan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2025
1129	Data indikator RPJMD yang disediakan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2025
1130	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2025
1131	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2025
1132	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2025
1133	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2025
1134	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2025

1135	Jumlah dokumen perencanaan tingkat kota	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2025
1136	Jumlah dokumen perencanaan tingkat kota yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2025
1137	Jumlah Indikator Program Perangkat Daerah mitra	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2025
1138	Jumlah indikator program perangkat daerah mitra yang tercapai diatas 76%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2025
1139	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2025
1140	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2025
1141	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2025
1142	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur dan Bidang Kewilayahan yang disusun	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2025
1143	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2025
1144	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2025
1145	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2025
1146	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2025
1147	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2025
1148	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian dan Bidang SDA yang disusun	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2025
1149	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2025
1150	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2025
1151	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2025
1152	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2025

1153	Jumlah Perangkat Daerah pengampu data urusan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2025
1154	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2025
1155	Nilai Perencanaan Kinerja dalam penilaian SAKIP	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2025
1156	Nilai SAKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2025
1157	Persentase capaian indikator program Perangkat Daerah mitra di atas 76%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2025
1158	Persentase data indikator RPJMD yang dapat disediakan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2025
1159	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2025
1160	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2025
1161	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan serta dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2025
1162	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2025
1163	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2025
1164	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2025
1165	Daftar Surat - Surat Pelayanan Bidang Tata Kota Surabaya Banyaknya Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR)	Badan Pendapatan Daerah	2025
1166	Daftar Surat - Surat Pelayanan Bidang Tata Kota Surabaya Banyaknya Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2025
1167	Jumlah anggaran mandatory spending sesuai amanat UU No. 1/2022 tentang HKPD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2025
1168	Jumlah Dokumen Hasil Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Badan Pendapatan Daerah	2025
1169	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	2025
1170	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2025

1171	Jumlah Objek Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, dan Parkir	Badan Pendapatan Daerah	2025
1172	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Badan Pendapatan Daerah	2025
1173	Jumlah obyek pajak hotel, resto, PPJ, parkir, hiburan, reklame dan air tanah yang terdaftar di sistem online	Badan Pendapatan Daerah	2025
1174	Jumlah obyek pajak hotel, resto, PPJ, parkir, hiburan, reklame dan air tanah yang terdata	Badan Pendapatan Daerah	2025
1175	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2025
1176	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2025
1177	Jumlah Penerimaan Daerah	Badan Pendapatan Daerah	2025
1178	Jumlah Penerimaan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2025
1179	Jumlah Penerimaan Pajak Pemerintah Daerah	Badan Pendapatan Daerah	2025
1180	Nilai SAKIP Badan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah	2025
1181	Opini BPK	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2025
1182	Opini BPK Kota Surabaya	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2025
1183	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2025
1184	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2025
1185	Persentase capaian realisasi pendapatan daerah	Badan Pendapatan Daerah	2025
1186	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen laporan Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Badan Pendapatan Daerah	2025
1187	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	Badan Pendapatan Daerah	2025
1188	Persentase kontribusi Pendapatan terhadap APBD	Badan Pendapatan Daerah	2025
1189	Persentase penerapan sistem online terhadap pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir	Badan Pendapatan Daerah	2025
1190	Persentase Tingkat Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2025
1191	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2025
1192	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2025

1193	Realisasi APBD	Badan Pendapatan Daerah	2025
1194	Realisasi pendapatan daerah yang dihitung	Badan Pendapatan Daerah	2025
1195	Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kota Surabaya	Badan Pendapatan Daerah	2025
1196	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	Badan Pendapatan Daerah	2025
1197	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2025
1198	Indeks Daya Saing Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2025
1199	Indeks Inovasi Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2025
1200	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2025
1201	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan inovasi serta pelaksanaan diseminasi yang disusun	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2025
1202	Jumlah kajian yang menjadi dasar dalam proses perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2025
1203	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2025
1204	Jumlah rekomendasi penelitian dan pengembangan inovasi yang dihasilkan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2025
1205	Jumlah rekomendasi penelitian dan pengembangan inovasi yang ditindaklanjuti	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2025
1206	Nilai Indeks Inovasi Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2025
1207	Persentase kajian yang mendukung dalam kebijakan perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2025
1208	Persentase rekomendasi penelitian dan pengembangan inovasi yang ditindaklanjuti	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2025
1209	Indeks Integritas Instansi	Inspektorat	2025
1210	Indeks kualitas pengawasan	Inspektorat	2025
1211	Indeks Kepedulian Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2025
1212	Jumlah Lembaga yang berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2025
1213	Jumlah Lembaga yang berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2025
1214	Jumlah organisasi kemasyarakatan sampai periode berjalan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2025

1215	Jumlah seluruh lembaga pendidikan menengah atas	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2025
1216	Jumlah seluruh lembaga pendidikan menengah atas	Dinas Pendidikan	2025
1217	Persentase organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2025
1218	Persentase penyediaan jasa penunjang umum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2025
1219	Tingkat Kepedulian Masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2025
1220	Tingkat Kepedulian Masyarakat terhadap nilai-nilai sosial, kemanusiaan, keagamaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2025
1221	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2025

Sekretaris Daerah Kota Surabaya
Selaku Atasan PPID Kota Surabaya,



Dr. Ikhsan S. Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 196908091995011002